BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran UNICEF dalam Menangani Kejahatan Transnasional yang Berdampak pada Hak Asasi Anak, khususnya kasus prostitusi online di Sumatera Selatan periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia telah berjalan signifikan dalam kerangka kebijakan dan perlindungan hukum. Kerja sama ini diwujudkan melalui sinergi program pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. UNICEF berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mendorong pendekatan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia dalam penanganan prostitusi online.

Implementasi kerja sama di tingkat daerah masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya, yang mengakibatkan program perlindungan anak belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara masif. Penelitian ini menunjukkan masih adanya kendala berupa keterbatasan koordinasi lintas sektor, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia, serta

tantangan perkembangan teknologi digital yang memperluas modus operandi prostitusi online anak. Implementasi perda dan undang-undang yang ada masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif dan programatik kerja sama UNICEF dan Pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan hak anak di Sumatera Selatan, peningkatan sinergi, kapasitas, dan respons kebijakan tetap diperlukan untuk mencapai penanganan *human trafficking* anak yang lebih efektif dan komprehensif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 dan Nomor 13 Tahun 2013 melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas aparatur di tingkat daerah. UNICEF diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan teknis, advokasi kebijakan, dan penguatan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis digital, khususnya prostitusi online, disertai dengan pengembangan mekanisme pencegahan melalui edukasi literasi digital bagi anak dan orang tua, penguatan sistem pelaporan yang ramah anak, serta peningkatan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban, sehingga penanganan kasus human trafficking anak di Sumatera Selatan dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

AT, M. Ramli, Mengge, B., Nuvida, R. A. F., Susanty, D., Nahar, D. P. K. A., & Perempuan, K. P. (2024). Modul Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan. Batukarinfo. Com. Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF Indonesia.

Budiyanto. (2025). Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka.

Diantha, I. M. P., Wisanjaya, I. G. P. E. (2023). Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional. Prenada Media.

Hurd, I. (2024). *International organizations: Politics, law, practice*. Cambridge University Press.

Irjananta, R. K., Anshari, F. A., & Sahida, Z. Z. (2025). *The Transnational Crime of Human Trafficking: A Human Security Approach:* By Maria O'Neill, New York: Routledge, Published 2023, 182 p.,£ 35.99 (eBook), ISBN: 9781003429791.

Juraidi, A. (2024). Human trafficking dalam Pandangan Islam. Maghza Pustaka.

May, R., & Wierda, M. (2021). *International criminal evidence* (Vol. 9). Brill.

Mirdad, M. A., Bahar, A. A., & Wisnuyana, B. (2025). Non-Governmental Organization (Ngo) Dalam Pandangan Tiga Perspektif-Hubungan Internasional, Kebijakan Publik dan Antropologi. Airlangga University Press.

Mufty, A. M. (2025). Hukum Pidana Internasional. Tahta Media Group.

Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022). *The Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries.* JASSP,

Sinaga, W. S. (2023). Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia. Ancaman Kejahatan Transnasional, 225.

Suud, M. (2023). Opini Derita dari dalam Dunia Prostitusi. Penerbit KBM Indonesia.

Thariq, A. A. (2023). Dilema Kejahatan Internasional Dalam Krisis Pengungsi: Tantangan Bagi Keamanan Global. Organized Crime,

Wulandari, H. (2021). Kekerasan & Penelantaran pada Anak. Universitas Brawijaya Press.

World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2023). Nurturing care handbook. Strategic action 5: scale up and innovate. How to expand programmes, engage with the private sector and use digital solutions. World Health Organization.

2. Jurnal

Ayu, Ida, and Dewinta Krisnantari. Kejahatan Transnasional: Kerjasama UNODC Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Indonesia, n.d. https://www.researchgate.net/publication/378372922.

Bagaskara, Annaas Maulana. Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Di Indonesia. Journal of International Relations. Vol. 4, 2018. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id.

Carisa Adelia, Aurora Saisabila , and Putri Tiara Sari, "Peran Organisasi Internasionail Di Dalam Suatu Negara," Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 6 (2024), https://doii.org/10.5281/zenodo.10492347

Eka Andriyani, Elisa, Habib Shulton Asnawi, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, and Fathul Mu. Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung , Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang (STAI TUBA) Lampung, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, Penulis Korespondensi). Vol. 8, n.d.

Habib, M. A. F., Ramadhani, M., Fatkhullah, M., Diniati, B. T. A., & Istiqoma, I. (2024). Strategi Digital Marketing atas Produk dan Layanan yang Ditawarkan dalam Bisnis Prostitusi Online. Jurnal Iptekkom (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi informasi), 26(1), 53-78.

Herbowo, H. D. (2025). Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi: Reconceptualizing Child Welfare in the Context of Social Policy: Between Welfare, Children's Rights, and Participation Approaches. Journal of Community Development and Disaster Management, 7(1), 353-371.

Iskandar, and Nursiti . “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia.” Jurnal HAM 12, no. 3 (December 31, 2021): 385. doi:10.30641/ham.2021.12.385-404.

Kalangi, R. J., Waha, C. J., & Gerungan, L. K. (2023). Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. Lex Privatum, 12(4).

Marthadyta, T. (2022). Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Di India Pada Tahun 2014-2018.

Oktavian, Alif, Aswan Haryadi, MSi Tine Ratna Poerwantika, M Si, Shylvia Windary, and M Dosen dan Peneliti Jurusan. Peran International Organization Of Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Indonesia, n.d. http://defensediplomacy.blogspot.co.id/2014/03/peran-.

Rahmanto, A. (2025). Perempuan Sebagai Pahlawan di Era Pandemi, Peran . “Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking,” n.d

Ramadhan, R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 5(1), 12-33.

Regina, N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children’s Protection in Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 13(8), 117-124.

Putri, V. V., & Zaky, M. (2024). Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(4).

Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Tana Mana, 6(2), 245-257.

Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi Sosial dalam Kasus Human Trafficking di Kamboja Berdasarkan Tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam Perspektif Sosiologis. Suara Edukasi Hukum, 1(1).

Widiasih, N. P. S., Saputra, I., Rustam, D. R., & Siva, A. P. (2025). Perlindungan

Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Kendari. Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 1(4), 583-592.

Prameswari, Z. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam System Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Vol.32, 1 Januari 2017.

Yaman, Fungsi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Indonesian Journal of Legality of Law, 2025.

Materi Perkuliahan Hukum Internasional Match Day 10 Hukum Organisasi Internasional 1, n.d.

3. Skripsi/Tesis

Artisa, T. (2022). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Child Trafficking Di Thailand Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura).

Aulia, K. P., Hidayat, N. S., Ahmad, R. K. M., Heryadi, R. D., & Sari, D. S. (2025). Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Rangka Menuju Indonesia Bebas Stunting Tahun 2021-2025. Padjadjaran Journal of International Relations, 7(2), 197-209.

Azzahra, S. S. Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Mitigasi Krisis Kemanusiaan Anak Di Nigeria Tahun 2020-2022 (Bachelor's thesis, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dewangga, A. S. (2023). Laporan MBKM By Design FKM Unair Unicef Wilayah Kota Surabaya Gambaran Pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Dt Dan Td Di Puskesmas Kebonsari (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Fadiyah, J. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Anak oleh Unicef Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2021-2024 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Hidayat, M. A. P. (2024). Implementasi Program AMAN Project dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak di Indonesia (Studi Komunikasi Pemberdayaan pada LSM ECPAT Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Ishwary, S., & Rosdiana, H. (2024). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Menangani Pemenuhan Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh Tahun 2017-2023. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2(3), 156-176.

Kindangen, I. N. (2021). Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lex Privatum, 9(13).

Ishwary, S., & Rosdiana, H. (2024). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Menangani Pemenuhan Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh Tahun 2017-2023. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2(3), 156-176.

Kindangen, I. N. (2021). Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lex Privatum, 9(13).

Ofrieni, J., & Natangsa Surbakti, (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Surakarta) Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Ramadhanty, J. F. S. A. (2022). Peran United Nations Children's Emergency Fund (Unicef) Dalam Menangani Permasalahan Anak Di Yaman Tahun 2015-2020.

Salsabila, F. M. (2023). Efektifitas Program United Nations Internasional Childern's Emergency Fund (Unicef) Dalam Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Tekualu, L. D. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Utami, L. N. P. (2011). Peranan Unicef Dalamperlindungananakkorbanlumpurlapindo (Doctoral dissertation, UAJY).

4. Internet

Antaranews.com. (2022, November 20). Polda Sumsel Selidiki Bisnis Prostitusi Daring di Hotel Palembang. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3256993/polda-sumsel-selidiki-bisnis-prostitusi-daring-di-hotel-palembang

https://peraturan.bpk.go.id/Details/36570 diakses pada tanggal 03 Desember 2025, pukul 14.00 wib

Sumeks.disway.id. (2023, Januari 7). Jadi Mucikari Prostitusi Online di Palembang, Pasangan Sejoli Tawarkan Kencan dengan Anak di Bawah Umur. Diakses dari https://sumeks.disway.id/read/652482/jadi-mucikari-prostitusi-online-di-palembang-pasangan-sejoli-tawarkan-kencan-dengan-anak-di-bawah-umur

5. Peraturan Perundang- Undangan dan Perjanjian Internasional

Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Sumatera Selatan. 2010. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.

Sumatera Selatan. 2013. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

United Nations. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime.* Palermo: UN General Assembly, 2000.

6. Wawancara

Amirudin, Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara Pribadi*, Sumatera Selatan, 05 November 2025.

Said, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan, *Wawancara Pribadi*, Sumatera Selatan, 05 November 2025.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA